



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 209);
  9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 557).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018.**

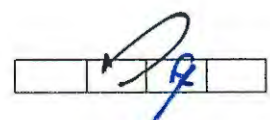
#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
8. Kecamatan adalah pembagian wilayah kerja administrasi di Indonesia di bawah Kabupaten yang terdiri atas desa-desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

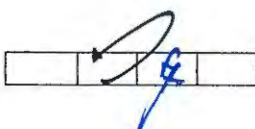
## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Anggaran 2018 kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterahkan desa di Kabupaten Lamandau.

## **Pasal 3**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian dana;
- b. penyaluran dana;
- c. prioritas penggunaan dana; dan
- d. pengelolaan.



**BAB II**  
**RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**Pasal 4**

- (1) Jumlah dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2018 berjumlah Rp.5.223.461.959,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Pengalokasian dana bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak masing-masing desa.

**Pasal 5**

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$DBHPRD = AD + AF$$

$$AD = \frac{JDBHPRD \times 60\%}{D}$$

$$AF = RRPD \times JAF$$

$$RRPD = (RPD / TRPD \times Z1) \times 100\%$$

Keterangan :

DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa

RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa

JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)

RPD = Realisasi Pajak Desa

TRPD = Total Realiasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau

D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

**Pasal 6**

Daftar penerima Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lamandau Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.



- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Rekomendasi Camat;
  - b. APBDesa Tahun Anggaran 2018; dan
  - c. Salinan Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa
  - d. Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT-PBB) Tahun 2017.
- (4) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan pelaksanaan inventarisasi aset desa sampai dengan tahun 2017 dan kepada Bupati Lamandau Up. Kepala DPMD Kabupaten Lamandau.

#### **BAB IV PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

##### **Pasal 8**

- Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2018 digunakan untuk :
- a. Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Kegiatan di bidang pembangunan;
  - c. Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. Kegiatan di bidang pembinaan masyarakat;

#### **BAB V PENGELOLAAN**


##### **Pasal 9**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	1.
ASISTEN	
KABBAG	
KASURBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2018

**BUPATI LAMANDAU,**



**MARUKAN**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2018 NOMOR 562

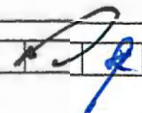
LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TANGGAL  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN  
 DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
 LAMANDAU TAHUN 2018.

**DAFTAR PENERIMA BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU**

No.	Kode Wilayah Administrasi Desa	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak per-Desa
					Reallasasi Pajak	Rasio Reallasasi Pajak		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/Σ(5)	(7)	(8)= (4) + (7)
1	62.09.01.2001	LAMANDAU	SUNGAI TUAT	36.871.496	4.275.486	0,002012	4.203.661	41.075.157
2	62.09.01.2002	LAMANDAU	TANJUNG BERINGIN	36.871.496	4.038.236	0,001900	3.970.400	40.841.897
3	62.09.01.2003	LAMANDAU	CUHAI	36.871.496	2.684.842	0,001263	2.639.741	39.511.237
4	62.09.01.2004	LAMANDAU	KAWA	36.871.496	17.896.205	0,008421	17.595.578	54.467.075
5	62.09.01.2005	LAMANDAU	KARANG TABA	36.871.496	4.568.175	0,002150	4.491.437	41.362.933
6	62.09.01.2006	LAMANDAU	PENOPA	36.871.496	8.326.825	0,003918	8.186.948	45.058.444
7	62.09.01.2007	LAMANDAU	SUJA	36.871.496	19.616.779	0,009231	19.287.250	56.158.746
8	62.09.01.2008	LAMANDAU	SEKOBAN	36.871.496	28.894.051	0,013597	28.408.679	65.280.175
9	62.09.01.2009	LAMANDAU	BAKONSU	36.871.496	63.041.129	0,029665	61.982.142	98.853.639
10	62.09.01.2022	LAMANDAU	SAMU JAYA	36.871.496	10.496.487	0,004939	10.320.163	47.191.660




(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/Σ(5)	(7)	(8)= (4) + (7)
11	62.09.02.2004	DELANG	RIAM PANAHAH	36.871.496	13.523.231	0,006364	13.296.063	50.167.559
12	62.09.02.2005	DELANG	SEPOYU	36.871.496	2.204.000	0,001037	2.166.976	39.038.473
13	62.09.02.2010	DELANG	NYALANG	36.871.496	6.453.922	0,003037	6.345.507	43.217.003
14	62.09.02.2011	DELANG	RIAM TINGGI	36.871.496	870.218	0,000409	855.600	37.727.096
15	62.09.02.2012	DELANG	LANDAU KANTU	36.871.496	1.401.856	0,000660	1.378.307	38.249.803
16	62.09.02.2013	DELANG	LOPUS	36.871.496	4.114.222	0,001936	4.045.110	40.916.606
17	62.09.02.2014	DELANG	KUBUNG	36.871.496	1.912.338	0,000900	1.880.214	38.751.710
18	62.09.02.2015	DELANG	SEKOMBULAN	36.871.496	4.970.981	0,002339	4.887.477	41.758.973
19	62.09.02.2016	DELANG	PENYOMBAAN	36.871.496	4.587.371	0,002159	4.510.311	41.381.807
20	62.09.02.2020	DELANG	HULU JOJABO	36.871.496	5.684.758	0,002675	5.589.263	42.460.760
21	62.09.03.2001	BULIK	SUNGAI MENTAWA	36.871.496	24.125.312	0,011353	23.720.047	60.591.543
22	62.09.03.2002	BULIK	GUCI	36.871.496	18.701.600	0,008800	18.387.444	55.258.940
23	62.09.03.2003	BULIK	BATU KOTAM	36.871.496	7.920.005	0,003727	7.786.962	44.658.458
24	62.09.03.2004	BULIK	KUJAN	36.871.496	84.898.473	0,039951	83.472.319	120.343.815
25	62.09.03.2006	BULIK	BUNUT	36.871.496	53.737.400	0,025287	52.834.701	89.706.197
26	62.09.03.2007	BULIK	BERUTA	36.871.496	60.461.746	0,028451	59.446.089	96.317.585
27	62.09.03.2008	BULIK	TAMIANG	36.871.496	90.528.870	0,042600	89.008.135	125.879.631





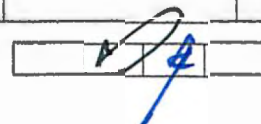
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/Σ(5)	(7)	(8)= (4) + (7)
28	62.09.03.2031	BULIK	BUMI AGUNG	36.871.496	52.054.694	0,024495	51.180.261	88.051.758
29	62.09.03.2032	BULIK	SUMBER MULYA	36.871.496	17.625.694	0,008294	17.329.612	54.201.108
30	62.09.03.2036	BULIK	BUKIT INDAH	36.871.496	6.136.300	0,002888	6.033.220	42.904.717
31	62.09.03.2037	BULIK	ARGA MULYA	36.871.496	54.998.128	0,025880	54.074.251	90.945.747
32	62.09.03.2043	BULIK	PERIGI RAYA	36.871.496	23.874.213	0,011234	23.473.166	60.344.662
33	62.09.03.2044	BULIK	NANGA PAMALONTIAN	36.871.496	6.935.306	0,003264	6.818.804	43.690.301
34	62.09.04.2001	BULIK TIMUR	NANGA PALIKODAN	36.871.496	1.967.500	0,000926	1.934.449	38.805.945
35	62.09.04.2002	BULIK TIMUR	SUNGKUP	36.871.496	18.738.108	0,008818	18.423.339	55.294.835
36	62.09.04.2003	BULIK TIMUR	NUANGAN	36.871.496	10.600.000	0,004988	10.421.938	47.293.434
37	62.09.04.2004	BULIK TIMUR	NANGA KORING	36.871.496	11.046.394	0,005198	10.860.833	47.732.329
38	62.09.04.2005	BULIK TIMUR	TOKA	36.871.496	7.613.440	0,003583	7.485.547	44.357.043
39	62.09.04.2006	BULIK TIMUR	SEPONDAM	36.871.496	13.525.975	0,006365	13.298.761	50.170.257
40	62.09.04.2007	BULIK TIMUR	MERAMBANG	36.871.496	6.790.406	0,003195	6.676.338	43.547.835
41	62.09.04.2008	BULIK TIMUR	PEDONGATAN	36.871.496	64.143.985	0,030184	63.066.472	99.937.968
42	62.09.04.2009	BULIK TIMUR	BATU TUNGGAL	36.871.496	19.717.948	0,009279	19.386.719	56.258.215
43	62.09.04.2010	BULIK TIMUR	NANGA KEMUJAN	36.871.496	1.505.125	0,000708	1.479.841	38.351.338
44	62.09.04.2011	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	36.871.496	23.272.554	0,010951	22.881.614	59.753.110



(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/Σ(5)	(7)	(8)= (4) + (7)
45	62.09.04.2012	BULIK TIMUR	SUKA MAJU	36.871.496	26.442.645	0,012443	25.998.452	62.869.949
46	62.09.05.2001	MENTHOBI RAYA	MELATA	36.871.496	72.206.013	0,033978	70.993.072	107.864.568
47	62.09.05.2002	MENTHOBI RAYA	NANUAH	36.871.496	25.332.130	0,011921	24.906.592	61.778.088
48	62.09.05.2003	MENTHOBI RAYA	BATU AMPAR	36.871.496	20.083.779	0,009451	19.746.405	56.617.901
49	62.09.05.2004	MENTHOBI RAYA	LUBUK HIJU	36.871.496	20.224.710	0,009517	19.884.968	56.756.465
50	62.09.05.2005	MENTHOBI RAYA	TOPALAN	36.871.496	30.219.170	0,014220	29.711.538	66.583.034
51	62.09.05.2006	MENTHOBI RAYA	BUKIT MAKMUR	36.871.496	73.442.790	0,034560	72.209.073	109.080.569
52	62.09.05.2007	MENTHOBI RAYA	MODANG MAS	36.871.496	58.080.393	0,027331	57.104.739	93.976.235
53	62.09.05.2008	MENTHOBI RAYA	BUKIT RAYA	36.871.496	74.630.870	0,035119	73.377.195	110.248.691
54	62.09.05.2009	MENTHOBI RAYA	MUKTI MANUNGGAL	36.871.496	56.689.097	0,026676	55.736.814	92.608.310
55	62.09.05.2010	MENTHOBI RAYA	SUMBER JAYA	36.871.496	25.069.600	0,011797	24.648.472	61.519.968
56	62.09.05.2011	MENTHOBI RAYA	BUKIT HARUM	36.871.496	68.480.106	0,032225	67.329.754	104.201.250
57	62.09.06.2001	SEMATU JAYA	BINA BHAKTI	36.871.496	51.207.986	0,024097	50.347.777	87.219.273
58	62.09.06.2002	SEMATU JAYA	WONOREJO	36.871.496	80.360.901	0,037815	79.010.971	115.882.467
59	62.09.06.2003	SEMATU JAYA	MEKAR MULYA	36.871.496	71.703.898	0,033742	70.499.391	107.370.887
60	62.09.06.2004	SEMATU JAYA	JANGKAR PRIMA	36.871.496	53.810.209	0,025321	52.906.287	89.777.783
61	62.09.06.2005	SEMATU JAYA	PURWAREJA	36.871.496	83.966.914	0,039512	82.556.409	119.427.905



(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/Σ(5)	(7)	(8) = (4) + (7)
62	62.09.06.2006	SEMATU JAYA	TRI TUNGGAL	36.871.496	76.911.903	0,036192	75.619.910	112.491.407
63	62.09.06.2007	SEMATU JAYA	BATU HAMBawang	36.871.496	16.467.913	0,007749	16.191.279	53.062.776
64	62.09.06.2008	SEMATU JAYA	RIMBA JAYA	36.871.496	30.437.804	0,014323	29.926.499	66.797.995
65	62.09.07.2001	BELANTIKAN RAYA	NANGA BELANTIKAN	36.871.496	14.305.697	0,006732	14.065.385	50.936.881
66	62.09.07.2002	BELANTIKAN RAYA	SUNGAI BULUH	36.871.496	41.488.018	0,019523	40.791.088	77.662.584
67	62.09.07.2003	BELANTIKAN RAYA	TANGGA BATU	36.871.496	16.203.710	0,007625	15.931.515	52.803.011
68	62.09.07.2004	BELANTIKAN RAYA	BELIBI	36.871.496	16.136.391	0,007593	15.865.326	52.736.823
69	62.09.07.2005	BELANTIKAN RAYA	BAYAT	36.871.496	52.891.668	0,024889	52.003.176	88.874.672
70	62.09.07.2006	BELANTIKAN RAYA	KARANG BESI	36.871.496	2.457.745	0,001157	2.416.459	39.287.955
71	62.09.07.2007	BELANTIKAN RAYA	BENUATAN	36.871.496	1.227.449	0,000578	1.206.830	38.078.326
72	62.09.07.2008	BELANTIKAN RAYA	KAHINGGAI	36.871.496	3.605.368	0,001697	3.544.804	40.416.300
73	62.09.07.2009	BELANTIKAN RAYA	NANGA MATU	36.871.496	1.992.345	0,000938	1.958.877	38.830.373
74	62.09.07.2010	BELANTIKAN RAYA	BINTANG MANGALIH	36.871.496	1.532.924	0,000721	1.507.173	38.378.670
75	62.09.07.2011	BELANTIKAN RAYA	PETARIKAN	36.871.496	1.161.745	0,000547	1.142.230	38.013.726
76	62.09.07.2012	BELANTIKAN RAYA	SUMBER CAHAYA	36.871.496	41.466.517	0,019513	40.769.948	77.641.444
77	62.09.08.2001	BATANG KAWA	BATU TAMBUN	36.871.496	2.308.459	0,001086	2.269.681	39.141.177
78	62.09.08.2002	BATANG KAWA	KINIPAN	36.871.496	7.898.783	0,003717	7.766.097	44.637.593



(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)/Σ(5)	(7)	(8)= (4) + (7)
79	62.09.08.2003	BATANG KAWA	GINIH	36.871.496	1.087.180	0,000512	1.068.917	37.940.413
80	62.09.08.2004	BATANG KAWA	BENAKITAN	36.871.496	2.403.301	0,001131	2.362.930	39.234.426
81	62.09.08.2005	BATANG KAWA	LIKU	36.871.496	895.412	0,000421	880.371	37.751.867
82	62.09.08.2006	BATANG KAWA	MENGKALANG	36.871.496	3.643.129	0,001714	3.581.930	40.453.427
83	62.09.08.2007	BATANG KAWA	KARANG MAS	36.871.496	1.695.520	0,000798	1.667.038	38.538.534
84	62.09.08.2008	BATANG KAWA	KINA	36.871.496	2.303.685	0,001084	2.264.987	39.136.483
85	62.09.08.2009	BATANG KAWA	JAMUAT	36.871.496	2.128.488	0,001002	2.092.733	38.964.229
<b>Total</b>				<b>3.134.077.175</b>	<b>2.125.082.653</b>	<b>1,000000</b>	<b>2.089.384.780</b>	<b>5.223.461.959</b>

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEDA	 1.
ASISTEN	
KABDAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**MARUKAN**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING**